

## DAFTAR PUSTAKA

- Febrianto, Robi. 2013. *Evaluasi Pengendalian Intern Dalam Sistem Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Malang*.
- Creswell, John W. 2011. *Research Design – Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi. 2014. Standar Operasi Prosedur tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Kantor. Bukittinggi.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi. 2014. Standar Operasi Prosedur tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Lapangan. Bukittinggi.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi. 2014. Standar Operasi Prosedur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bukittinggi.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi. 2014. Standar Operasi Prosedur tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bukittinggi.
- Elisha, Muthia. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 (Studi Kasus Pada DPKA Kota Padang)*.
- Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014.
- Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung : Ghalis Indonesia.
- Pemerintah Kota Bukittinggi. 2012. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 No. 5. Sekretariat Daerah. Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi. 2014. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-132-2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2014. Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi. 2015. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-52-2015 tentang Penunjukan Kolektor Kelurahan Tahun 2015. Bukittinggi.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ditjen Perimbangan Kementerian Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Bersama Menteri Keuangan No. 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Jakarta.

